

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG
(SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA
TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
Hilda Ayu Duanti
NIT.21303687

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The Klaten Regency Public Information System (SITARU) facilitates public access to spatial planning information. They no longer need to visit the Public Works and Housing Agency's (DPUPR) Spatial Planning Division; they can simply access the website sitaru.klaten.go.id. However, as of this study, SITARU is considered ineffective. Spatial planning violations continue to be reported, reaching 72 hectares in 2022 and increasing to 142 hectares in 2024. One contributing factor to these violations is that violators either fail to access SITARU or access SITARU without adequate information. This study aims to analyze Klaten Regency and assess the quality of SITARU's spatial planning information services, meeting ISO 25010 standards.

This study employed a mixed methods approach. Data collection included observation, interviews, questionnaires, and a literature review. The sample consisted of Klaten Regency Public Works and Housing Agency employees and members of the public who visited the Klaten Regency Public Works and Housing Agency's Spatial Planning Division over a one-month period.

The current implementation of SITARU has been utilized by various groups, such as bureaucrats, potential investors, and the general public. However, some people still come directly to the Spatial Planning Division of the Public Works and Public Housing Agency to check their zones. These include those who are unaware of SITARU's existence, those who are unwilling to use it, and those who want to reconfirm the information they receive. Furthermore, the quality of SITARU's spatial planning information services in Klaten Regency, based on ISO 25010, is deemed adequate by the public. With scores of 79% Effectiveness, 79% Efficiency, 80% Satisfaction, 79% Freedom from Risk, and 79% context coverage.

Keywords: *SITARU, Spatial Planning, ISO25010*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Sistem Informasi.....	15
2. Tata Ruang	26
3. Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU).....	28
4. Pelayanan bagi Masyarakat	30
C. Kerangka Pemikiran.....	33
D. Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	38
1. Populasi	38
2. Sampel	39
3. Teknik Pengambilan Sampel	40
D. Definisi Operasional dan Variabel	40
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	52
BAB V IMPLEMENTASI SITARU DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN	59
BAB VI KUALITAS SITARU DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN ISO 25010	68
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi terkait rencana umum dan rencana rinci tata ruang guna mendukung pelaksanaan penataan ruang di wilayahnya. Selain itu, sebagai salah satu bentuk pembinaan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemda adalah dengan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang mendukung dalam penataan ruang.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada Pasal 226 disebutkan bahwa bentuk pembinaan penataan ruang meliputi pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat, dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap tata ruang. Terkait dengan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dijelaskan dalam Pasal 232 merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu, yang dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Memasuki era pelayanan publik yang mengedepankan konsep industri 4.0, Pemda dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Era ini memungkinkan Pemda untuk mengembangkan pelayanan informasi

spasial berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Maka sudah saatnya Pemda harus mulai membangun dan melakukan pemutakhiran sistem informasi tata ruang agar dapat mencerminkan semangat transparansi informasi publik dan kecepatan pelayanan bidang tata ruang kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Klaten khususnya terkait dengan dukungan percepatan dan kemudahan berinvestasi dapat terus dioptimalkan guna mendorong kemajuan Kabupaten Klaten ke arah yang lebih baik.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tupoksi dalam pengembangan wilayah dan pengelolaan tata ruang. Hal tersebut dikarenakan kabupaten terletak di antara kota besar seperti Yogyakarta dan Solo. Kabupaten Klaten juga memiliki sumber daya alam yang beragam salah satunya ialah lahan pertanian yang subur, bahkan Kabupaten Klaten dijuluki sebagai lumbung pangan nasional. Namun, berdasarkan Kabupaten Klaten dalam angka 2024, telah terjadi penurunan luas lahan pertanian dari 67.242,00 ha pada tahun 2021 menjadi 64.377,47 ha pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Berdasarkan Permen ATR/ KBPN RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Pasal 5 , pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyediaan dalam bentuk digital tersebut agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/ atau usahanya dengan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga Dinas PUPR Kabupaten Klaten membangun *website* SITARU.

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klaten telah membangun website Sistem Informasi

Tata Ruang (SITARU) yang memuat informasi tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031. Kemudian pada tahun 2021, Dinas PUPR Kabupaten Klaten melakukan pengembangan SITARU dengan memuat informasi tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.

SITARU merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan tata ruang di tingkat kabupaten. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan data terkait penggunaan ruang, peruntukan ruang, dan kebijakan tata ruang. SITARU bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ruang, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. SITARU merupakan *platform* yang digunakan oleh beberapa kabupaten di Indonesia untuk mengelola dan menyajikan informasi terkait tata ruang, seperti SITARU Kota Bekasi, SITARU Kota Jogja, SITARU Kabupaten Pesisir Barat, BATARA Kabupaten Badung, dan lain sebagainya. Meskipun setiap kabupaten memiliki SITARU, namun nama dan fitur yang ditawarkan bervariasi berdasarkan kebutuhan dan kebijakan daerah masing-masing.

Salah satu contoh Sistem Informasi Tata Ruang yang mendapatkan kategori baik berdasarkan survey kepuasan masyarakat adalah Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) Kota Bekasi. SITARU Kota Bekasi merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan dalam urusan tata ruang di Kota Bekasi. SITARU Kota Bekasi dibangun pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menciptakan proses birokrasi yang transparan, mudah, dan meminimalisir tindakan curang dari berbagai sektor. Beberapa fitur yang ada pada SITARU Kota Bekasi yaitu, 1) Melihat peta informasi pola ruang/ Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi, 2) Melihat peraturan terkait tata ruang, 3) Arah

kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi, dan 4) Album peta (Kusuma, 2023).

Kabupaten Klaten memiliki Sistem informasi tata ruang yang dinamakan SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Kabupaten Klaten. Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) merupakan suatu sistem informasi berbasis *website* yang memuat informasi spasial khususnya terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. SITARU menampilkan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. SITARU ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui zona dari titik lokasi yang diinginkan. Pemanfaatan SITARU ini sekedar menampilkan informasi tata ruang.

SITARU berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi mengenai rencana tata ruang beserta ketentuan pemanfaatan ruang yang ada di dalamnya (Ameyria dan Laelabilkis, 2019). Menurut Peraturan Bupati Sleman nomor 45 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Tata Ruang, penyelenggaraan SITARU bertujuan untuk menyediakan mekanisme dalam penyediaan dan akses informasi tata ruang berbasis teknologi informasi. Sedangkan manfaat dari SITARU antara lain:

1. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tata ruang untuk keperluan penelitian, perizinan, atau investasi;
2. Memperluas cakupan informasi publik di bidang penataan ruang
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; dan
4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

Sebelum adanya SITARU, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 2) ketentuan pemanfaatan ruang, dan 3) potensi pelanggaran tata ruang. Adanya SITARU ini diharapkan dapat menyediakan akses informasi tata

ruang yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke pelayanan Bidang Tata Ruang DPUPR dalam mencari informasi terkait tata ruang, terutama bagi masyarakat yang berada di luar kota karena informasi tata ruang dapat diakses melalui *website* SITARU. Namun sampai dengan kajian ini dilakukan, SITARU dinilai belum efektif. Salah satunya dapat dilihat dari masih ditemukannya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten, yang pada tahun 2022 mencapai 72 ha dan meningkat menjadi 142 ha pada tahun 2024. Pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut terjadi karena orang-orang yang melakukan pelanggaran tidak mengakses SITARU, atau mengakses SITARU namun penyediaan informasi kurang. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Implementasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) dalam Pelayanan Informasi Rencana Tata Ruang bagi Masyarakat di Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi SITARU dalam pelayanan informasi rencana tata ruang di Kabupaten Klaten?
- b. Bagaimana kualitas SITARU dalam pelayanan informasi tata ruang di Kabupaten Klaten berdasarkan ISO 25010?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Menganalisis implementasi SITARU dalam pelayanan informasi rencana tata ruang di Kabupaten Klaten
 - 2) Menilai kualitas SITARU dalam pelayanan informasi tata ruang di Kabupaten Klaten dengan ISO 25010

- b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis, sosial maupun praktis baik para pembaca di dunia akademis maupun lainnya. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1) Manfaat Ilmiah/akademis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan tata ruang, khususnya dalam konteks penerapan SITARU dalam meningkatkan pelayanan informasi tata ruang bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.

2) Manfaat Sosial

Masyarakat dapat mengetahui petunjuk penggunaan SITARU dalam pelayanan informasi tata ruang di Kabupaten Klaten, Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya tata ruang, dan meningkatkan literasi digital masyarakat terkait penggunaan SITARU.

3) Manfaat Praktis

Membantu instansi untuk mempublikasikan adanya Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) kepada masyarakat serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi DPUPR Klaten.

D. Batasan Penelitian

Guna mencapai fokus penelitian, maka peneliti menentukan batasan berupa:

- a. Peta yang digunakan dalam aplikasi SITARU berupa peta rencana pola ruang tahun 2021; dan
- b. Kualitas SITARU diuji menggunakan karakteristik ISO 25010 dengan *Quality in Use Model*.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini. Kesimpulan ini disusun sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Implementasi SITARU merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan informasi tata ruang bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Masyarakat dapat melakukan pengecekan zona secara online tanpa datang langsung ke pelayanan Dinas PUPR. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti masih ada sebagian masyarakat yang belum menggunakan SITARU, dokumen yang terdapat didalamnya belum lengkap (hanya terdapat RTRW dan tidak ada RDTR) dan fitur untuk mencetak dokumen informasi tata ruang yang dibutuhkan masyarakat belum ada dalam SITARU; dan
2. Kualitas SITARU dalam pelayanan informasi tata ruang di Kabupaten Klaten berdasarkan ISO 25010 dengan menggunakan 5 karakteristik yaitu *Effectiveness*, *Efficiency*, *Satisfaction*, *Freedom from risk*, dan *context coverage*. Dengan nilai *Effectiveness* 78,21%, *Efficiency* 80%, *Satisfaction* 80%, *Freedom from risk* 79%, dan *context coverage* 76%. Dan didapatkan hasil skor berdasarkan keseluruhan sebesar 2765 dari total skor 3500 yang berada pada interval 2187,6 – 2843,75 dan masuk ke dalam kategori “Layak”. Rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Dinas PUPR terkait SITARU berdasarkan ISO 25010 yaitu perlu dilakukannya penyempurnaan fitur-fitur pada SITARU seperti fitur cetak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, dapat dilakukan optimalisasi terkait waktu yang dibutuhkan untuk mengakses SITARU,

layanan yang diberikan SITARU harus dapat memenuhi harapan pengguna, Informasi yang disediakan SITARU harus lengkap dan relevan untuk mencegah risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, SITARU harus dapat beradaptasi dengan setiap kebutuhan yang berbeda, dan SITARU dapat terintegrasi dengan sistem lain yang relevan, sehingga dapat memudahkan akses informasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kedepannya. Berikut beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun secara langsung agar masyarakat menggunakan SITARU. Dapat ditambahkan beberapa fitur yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk pengembangan SITARU; dan
2. Dapat dilakukan peningkatan kualitas sistem agar dapat mencapai tujuan SITARU dan dapat dilakukan penyempurnaan SITARU baik berupa fitur cetak, optimalisasi waktu, kesesuaian harapan pengguna, informasi yang lengkap dan relevan, dan dapat terintegrasi dengan sistem lain yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. W. (2021). *Evaluasi Kelayakan Penggunaan Aplikasi Sistem informasi Plotting Pertanahan (SI-PILOT) dalam Validasi Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aini, A. (2007). Sistem Informasi Geografis Pengertian Dan Aplikasinya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 5–24. <https://doi.org/http://stmik.amikom.ac.id/>
- Alfiatunnisa, E., Zulfah Khairunnisa, H., Hayati, S., & Listya Maulida, V. (2022). Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Kemandirian Siswa Sekolah Dasar Kelas 1. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 3(2), 29–36. <https://doi.org/10.56806/jh.v3i2.81>
- Ameyria, D., & Laelabilkis. (2019). Urgensi Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) Sebagai Instrumen Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Magelang*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v2i1.23>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- BPS. (2024). *Kabupaten Klaten dalam Angka Klaten Regency in Figures 2024* (B. K. Klaten (ed.)). Klaten. BPS Kabupaten Klaten.
- Cindi, W., Elmayati, & Citra, Y. (2020). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Grab Kota Lubuklinggau Menggunakan Framework Pieces. *Jurnal Teknologi Informasi Mura*, 12(02), 118–130. <https://www.academia.edu/download/99856093/640.pdf>
- Fitriani, B., Angraini, T., & Putra, Y. H. G. (2018). Pemodelan Use Case Diagram

Sistem Informasi Inventaris Laboratorium Teknik Mesin. *Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi 2018*, 626–631.

Hidayati, A. (2019). *Penilaian Kualitas Aplikasi Web Dengan ISO 9126* [Institut Teknologi Sepuluh Nopember]. <https://repository.its.ac.id/72454/>

Kurnia, J. S., & Risyda, F. (2021). Rancang Bangun Penerapan Model Prototype Dalam Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Persediaan Barang Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 8(2), 223–230. <https://doi.org/10.35968/jsi.v8i2.737>

Kusuma, A. D. (2023). *Inovasi Pelayanan Aplikasi SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi* [Universitas Muhammadiyah Jakarta]. <https://repository.umj.ac.id/17112/>

Mokodongan, R. P., Rondonuwu, D. M., & Moniaga, I. L. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034. *Spasial*, 6(1), 68–77. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/22821>

Muhammad, A. H., Ajisaputro, B., & Sudin, S. (2022). Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Menggunakan Standar ISO 9126. *Produktif*, 6(1), 509–515. <https://doi.org/10.35568/produktif.v6i1.2126>

Mulyawan, M. D., Kumara, I. N. S., Swamardika, I. B. A., & Saputra, K. O. (2021). Kualitas Sistem Informasi Berdasarkan ISO/IEC 25010: Literature Review. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20(1), 15. <https://doi.org/10.24843/mite.2021.v20i01.p02>

Mustofa, F. C. (2020). Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 158–172. http://repository.stpn.ac.id/318/1/3_Fahmi CM.pdf

- Perrina, M. G. (2021). Literature Review Sistem Informasi Geografis (SIG). *Journal of Information Technology and Computer Science*, 10(10), 1–4.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Thun 2021-2041. Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Klaten.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2023. Klaten.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2021. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten. Berita Daerah Nomor 65 Tahun 2021. Klaten.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 2021. Jakarta.
- Ramdany, S. wahyu, Kaidar, S. A., Aguchino, B., Putri, C. A. A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30–41. <https://doi.org/10.31599/2e9afp31>
- Sagari, D. (2021). *Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Katen*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Santoso, M. H. (2023). Pengembangan Aplikasi Mobile yang User-Friendly: Strategi Desain UX. *Catatan Literasi*, 1(1), 1–11.

<https://liternote.com/index.php/ln/article/view/2>

Sarjono, Haryadi, & Julianita. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Aplikasi untuk Riset*. Jakarta. Salemba Empat.

Sasongko, I. (2023). *Penataan Ruang Pengantar Pemahaman Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan*. <http://eprints.itn.ac.id/11362/>

Septiani, Y., Aribbe, E., & Diansyah, R. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(1), 131–143. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>

Setioko, S., Widodo, W., & Saputra, P. R. (2024). *Manajemen Pelayanan Publik*. Malang. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2, 69–75. <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>

Sodikin, & Susanto, E. R. (2021). Sistem Informasi Geografis (Gis) Tempat Wisata Di Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2(3), 125–135. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTISI>

Sulistiowati, N., & Nursetianti. (2023). *Analisis Kualitas Aplikasi E-Learning Infrastruktur Berbasis Masyarakat Berbasis Web Menggunakan Standar ISO 25010*. 2(1), 133–139. <https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/article/view/506>

Tangkudung, I., Dako, R. D. R., & Dako, A. Y. (2019). Evaluasi Website Menggunakan Metode ISO/IEC 25010. *Seminar Nasional Teknologi Sains Dan Humaniora*, 1(1), 87–107.

<http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/463>

Utama, A. Y. P., Putra, I. B. U., & Amerta, I. M. S. (2021). *Keterbukaan Sistem Informasi*. Surabaya. PT. Scopindo Media Pustaka.

Wahid, Y. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama.